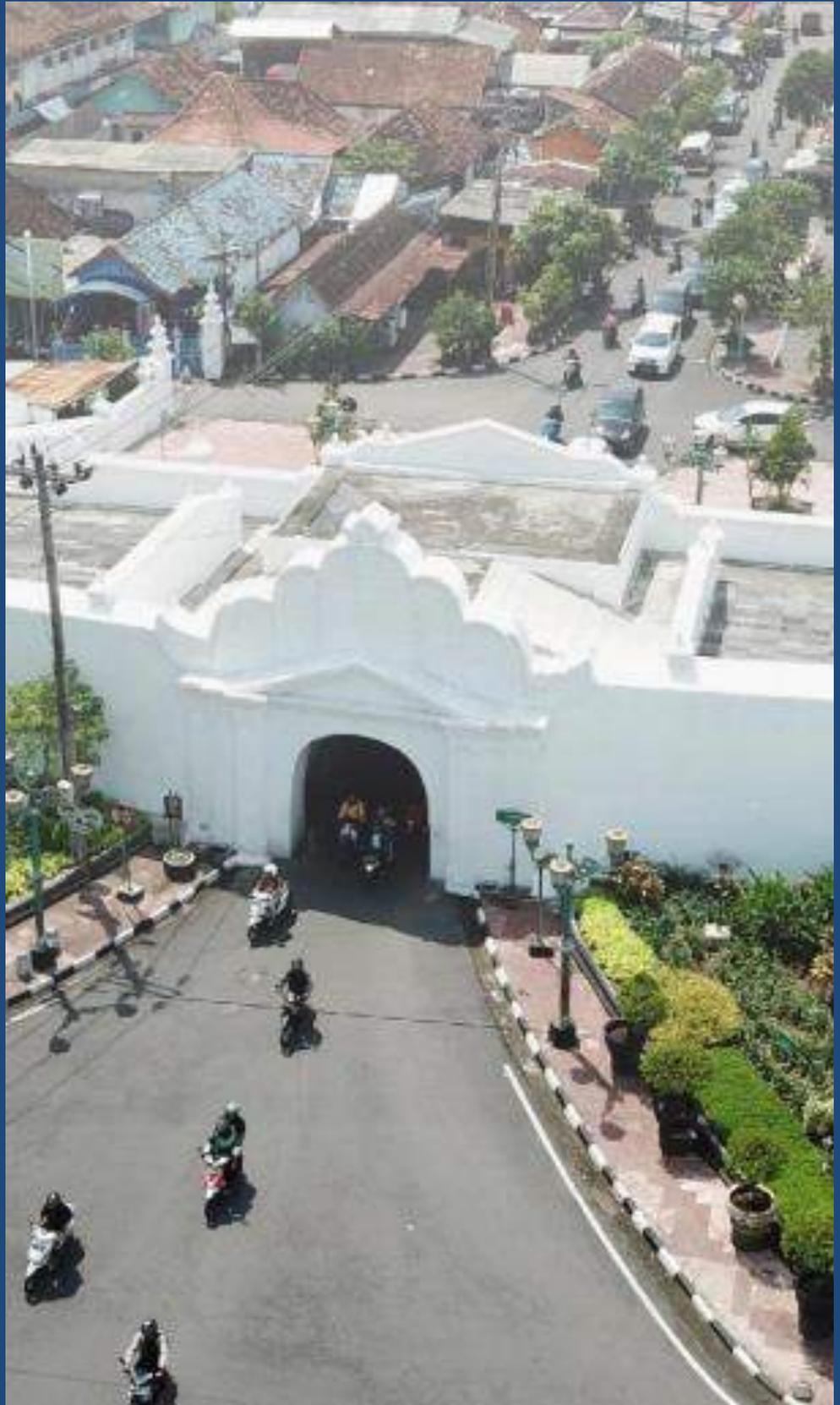




RENCANA KERJA TAHUN 2023



DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
KOTA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan periode satu tahun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 yang disusun berpedoman pada RKPDP Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 diusulkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan perencanaan kegiatan dapat terarah dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan yang akan dicapai.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP
NIP. 19720411 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4. Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
2.2. Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	II - 9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III - 3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	
	V - 1

BAB I PENDAHULUAN

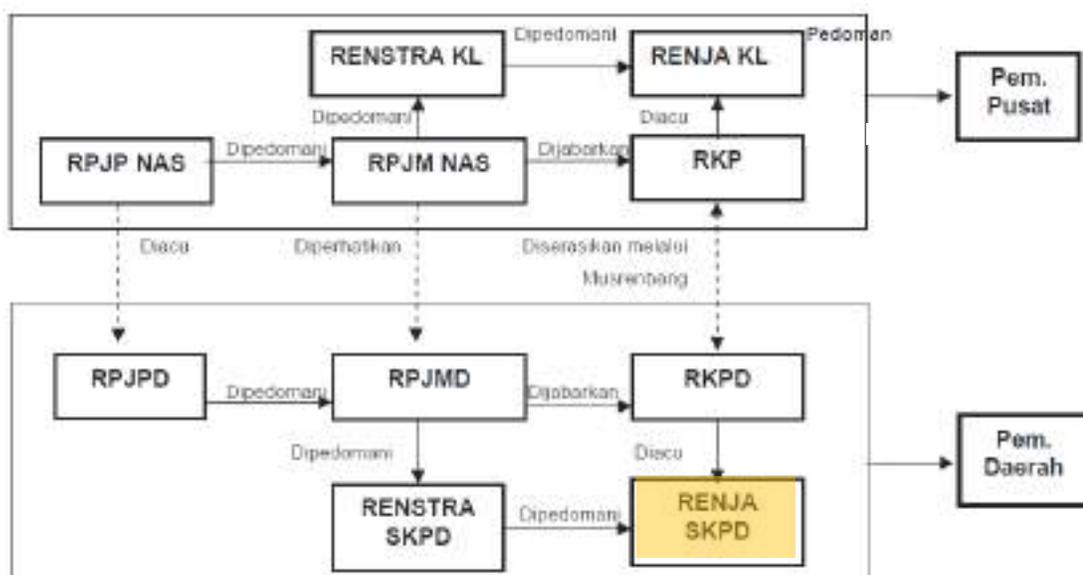
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan: a) persiapan penyusunan, b) penyusunan rancangan awal, c) penyusunan rancangan, d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e) perumusan rancangan akhir, dan f) penetapan.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan antar dokumen perencanaan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan Renja tahun pertama pada periode Renstra Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Yogyakarta tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Yogyakarta pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu **“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”**

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, yang telah mengakomodir program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengarahkan koridor pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 melalui tema **“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”**.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga telah bersinergi, dan melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta untuk mendukung prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan”** dan **“Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi”** serta mendukung sasaran **“Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang”** dan **“Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan”**.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah diantaranya :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana);
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22); dan
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023.

Adapun tujuannya adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada dalam Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi hasil perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan, output, dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting, yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian diantaranya program, kegiatan, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan Renja tahun pertama pada masa Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026. Hasil evaluasi capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 masih menjadi acuan pada penyusunan Renja tahun 2023 mengingat bahwa rumusan sasaran, program, dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra tahun 2023 – 2026 masih selaras dan merupakan keberlanjutan dari Renstra tahun 2017 – 2022.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1.

KORPORASI DAN KEMERDEKAAN PERUSAHAAN RUMAH DAN/ATAU KAWASAN KOTA																						
	7	Kontribusi dan Sertifikasi Pembangunan Ruang untuk Kawasan dan Pembangunan Daerah	Kajian studi awal percontohan zoning dan pemertan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	226.573.040,00	100,00%	226.573.041,30	100,00%	226.522.200,00	100,00%	90,99%								
	8	Manajemen Informatika Pelayanan Ruang	Penyusunan Modul Penyelenggaraan Informasi Geospasial	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	272.413.080,00	100,00%	272.413.081,30	100,00%	272.417.000,00	100,00%	99,99%								
			Pengadaan Cetak dan Upload Successful View Yogyakarta	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100,00%				100,00%		100,00%									
KORPORASI DAN KEMERDEKAAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN RUMAH DAN/ATAU KAWASAN KOTA																						
	9	Kontribusi dan Sertifikasi Pembangunan Kawasan dan Sertifikasi Ruang Perumahan Ruang	Pemberian Inisiatif Desainatif Ruang Perumahan Ruang	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	48.217.080,00	100,00%	48.227.000,30	100,00%	48.187.000,00	100,00%	90,99%								
			Formulasi Instruksi Menteri Persebaran dan Rasio Perumahan Ruang	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100,00%				100,00%		100,00%									
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100,00%				100,00%		100,00%									
	10	Kontribusi dan Sertifikasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem Ruang Perumahan Ruang	Audit Tata Ruang	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	138.791.080,00	100,00%	138.791.081,30	100,00%	138.690.000,00	100,00%	90,99%								
			Pengembangan Penyelenggaraan Perumahan Ruang	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100,00%				100,00%		100,00%									
	11	Kontribusi dan Sertifikasi Pembangunan Ruang	Kontribusi dan Sertifikasi Pembangunan Ruang	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	89.830.000,00	100,00%	89.730.041,30	100,00%	89.900.000,00	100,00%	90,99%								
Rata-rata capaian kinerja																			100,00%	97,48%		
Penilaian Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Tingkat Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase penyelesaian Izin Lokasi	Sangat lebih banyak yang tidak dibagi jumlah pemukiman izin lokasi yang sudah > 100%	100,00%	9.400.000,00	---	0,00%	100,00%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	7.670.000,00	100,00%	91,64%				Sangat Tinggi dan Pengerjaan			
PENYERAJAAN DAN KEMERDEKAAN PERUSAHAAN RUMAH DAN/ATAU KAWASAN KOTA																						
	1	Kontribusi dan Sertifikasi Pembangunan dan Sertifikasi Ruang Perumahan Ruang	Eks Lokasi dan Izin Pembangunan Perumahan Ruang	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	7.420.000,00	100,00%	7.420.000,30	100,00%	7.420.000,00	100,00%	90,99%								
Rata-rata capaian kinerja																			100,00%	90,99%		
Penilaian Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Tingkat Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PENYELESAIAN DEMOKRASI TANPA DASAR	Persentase penyelesaian keberatan terhadap permohonan tanah di Kota Yogyakarta	Jumlah permohonan terhadap masalah pertanahan yang terlokalisasi dibagi jumlah permohonan pertanahan yang masuk > 100%	100,00%	101.750.750,00	73.630.000,00	100,00%	100.000.750,00	100%	100.000.750,00	100%	100.000.750,00	100,00%	100,00%	100,00%				Sangat Tinggi dan Pengerjaan			
PENYERAJAAN SINGKAT TERHADAP CORONA DAN/ATAU KAWASAN KOTA																						
	1	Investasi dan Sertifikasi Pembangunan dan Sertifikasi Ruang Perumahan Ruang						181.750.750,00		73.630.000,00		207.081.371,30	100,00%	200.750.000,00	100,00%	90,57%			Tahun 2020 berdasar laporan Penyelenggaraan Masalah Perumahan			

	2	Pengembangan Sistem Perencanaan Tata Lahan Pengawasan Tanah Kawasan dan Kabupaten	Rekomendasi pengembangan perencanaan tata lahan hasil uji terapan dan kualifikasi di Kota Yogyakarta	100	Rekomendasi	1	Rekomendasi	200	Rekomendasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
	3	Pengembangan, Kelayakan dan Kompleksi Perumahan Tanah Kawasan Tanah Kabupaten dan Tanah Desa	Fasilitas Perumahan kompleks perumahan, kolaborasi kolaborasi perumahan dan tanah perdesa Tanah Kawasan dan Tanah Kabupaten di Kota Yogyakarta	1	Yogyakarta	3	Yogyakarta	1	Yogyakarta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
	4	Pengembangan Sistem dan Fasilitas Perumahan, Fasilitas dan Kegiatan Komunitas (Garden Perumahan)	Perumahan Komunitas (Garden Perumahan)	3	Yogyakarta	3	Yogyakarta	1	Yogyakarta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
			Perumahan Komunitas (Garden Perumahan)	3	Yogyakarta	3	Yogyakarta	1	Yogyakarta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
Rata-rata Capaian Kinerja													94,34%	94,98%									
Preduksi Kinerja													Bermet	Tinggi									
Total anggaran dari seluruh program										12.402.246.000,00	12.402.246.000,00	30.305.033.625,00											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)													94,67%	95,41%									
Preduksi kinerja dan seluruh program (program 1 s.d. program 6)													Bermet	Tinggi									
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja	(1) Ketersediaan sumber anggaran melalui mekanisme dalam rangka pelaksanaan kegiatan (2) Tersedianya SDM yang kompeten dan sesuai kualifikasi (3) Tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang memadai																						
Tantangan Penghambat Keberhasilan Kinerja	(1) Ketidaksihan perencanaan dan koordinasi berbagai unsur sebagai tidak terpadu dan terintegrasi (2) Dugaan adanya perubahan kebijakan dan peraturan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (3) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (4) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (5) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (6) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (7) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (8) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (9) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (10) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (11) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (12) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (13) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (14) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (15) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (16) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (17) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (18) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (19) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (20) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan																						
Tingkat keberhasilan yang diharapkan dalam keadaan berkecukupan	Tingkat keberhasilan yang diharapkan dalam keadaan berkecukupan adalah tercapainya seluruh indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan																						
Tingkat keberhasilan yang diharapkan dalam keadaan berkekurangan	Tingkat keberhasilan yang diharapkan dalam keadaan berkekurangan adalah tercapainya sebagian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan																						
Yogyakarta, Desember 2020,										Yogyakarta, Desember 2020,													
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang (KUNCIAN/PT/KK/DK/DA/SK/DT/TA/SAS/NA)										Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
WAWU196001019, ST, 6A, 87F NIP. 1910041128821987										Agus Tri Haryono, ST, MT 407 1910041128821987													

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang pada tahun 2017 – 2022 diukur dari capaian Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Review Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2017 –2022 yaitu:

1. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan
Indikator : Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
2. Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan
Indikator: Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan tercapai 71,92 dari target 70,45 atau tercapai 102,09%.
Capaian kinerja Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan pada tahun 2021 didukung oleh capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan terealisasi sebesar 86,99% dari target sebesar 86,31% atau kinerjanya tercapai 100,79%
Capaian kinerja Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan pada tahun 2021 didukung oleh capaian pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dan Program Pengelolaan Tanah Kosong. Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan juga didukung oleh Program Pengelolaan izin Lokasi, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dan Program Penatagunaan Tanah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sesuai Indikator Sasaran dan Program disajikan pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Indikator Sasaran :											
1	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan tata ruang.			70,45 %	81,97 %			71,92 %		82,33 %	82,88 %	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan			86,31 %	100 %			86,99 %		93,91 %	95,43 %	
3	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat			-	-			-		91	91,01	
II	Indikator Program :											
1	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang			78,64 %	88,48 %			81,59 %		88,67%	89,19%	
2	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang			62,25 %	75,45 %			62,25 %		76%	76,56%	
3	<i>Persentase Penerbitan Izin Lokasi</i>			<i>100 %</i>	<i>100 %</i>			<i>100 %</i>		-	-	
4	<i>Persentase Penanganan Keberatan terhadap Permasalahan Tanah di Kota Yogyakarta</i>			<i>100 %</i>	<i>100 %</i>			-				
	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan									100 %	100 %	
5	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah			99,02 %	100 %			99,02 %		98,27 %	98,85 %	
6	<i>Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot.</i>			<i>79,76 %</i>	<i>100 %</i>			<i>80,80 %</i>				
	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot									91,67 %	93,67 %	
7	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.			75 %	100 %			75 %		50 %	66,67 %	
8	<i>Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar Kecamatan dan antar Kelurahan</i>			<i>93,33 %</i>	-			<i>93,33 %</i>		-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten									25 %	50 %	
10	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta									25 %	50 %	
11	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)									A	A	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta masih mengalami permasalahan-permasalahan, diantaranya:

a. Urusan Penataan Ruang

- 1) RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta tahun 2021 disusun mengikuti standarisasi Pemerintah Pusat sehingga masih membutuhkan beberapa pengaturan lainnya yang terkait penguatan lokal.

Standarisasi Pemerintah Pusat disusun agar seluruh wilayah di Indonesia memiliki format rencana tata ruang yang sama namun pada kenyataannya setiap wilayah memiliki kekhasan masing-masing yang sebenarnya tidak dapat disamaratakan demikian pula dengan Kota Yogyakarta yang sudah mantap tata ruangnya selama lebih dari 200 tahun. Oleh karena itu untuk mempertahankan kemantapan tata ruang yang sudah ada diperlukan kebijakan, pengaturan, dan pengendalian yang lebih khusus dan tidak harus sama dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

- 2) Belum terintegrasinya pelayanan tata ruang daerah dan pusat dalam platform online.

Sistem Online Single Submission (OSS) yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sebagai platform tunggal untuk perizinan ternyata belum dapat sepenuhnya digunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan layanan turunan dibawahnya seperti layanan KKPR yang belum dapat menjadi acuan dari penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- 3) Permasalahan terkait tata ruang memerlukan penanganan yang komprehensif dan multi sektor.

Permasalahan-permasalahan tata ruang melingkupi berbagai sektor diantaranya: lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, permukiman, perdagangan, dan kebudayaan yang pada masing-masing sektor tersebut diampu oleh organisasi atau lembaga tersendiri. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang diperlukan sebuah lembaga adhoc yang mampu mensinergikan penyelesaian permasalahan tata ruang yang ada.

- 4) Luas RTHP Kota Yogyakarta belum memenuhi target 20% dari luas Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil sinkronisasi regulasi data RTH sekota Yogyakarta, RTHP di Kota Yogyakarta telah bertambah dari sebelumnya hanya 5,87% pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,11% pada tahun 2020. Untuk pemenuhan target luasan RTHP di dalam RTRW telah ditetapkan berbagai kebijakan antara lain berupa pembelian

tanah-tanah untuk digunakan sebagai RTHP. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2022 luasan RTHP masih belum dapat mencapai 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

5) Ketersediaan ruang publik yang terbatas

Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti menjadi akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan RTHP sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi masyarakat dan untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman huni.

6) Kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta.

Dari tahun ke tahun persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 telah mencapai 79,84%. Namun demikian, pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang ke depan yang lebih baik dan akuntabel memerlukan juga dukungan ketersediaan dan penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang selaras dengan pengaturan pada RTRW dan RDTR.

7) Menurunnya karakter kawasan-kawasan di Kota Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta terdapat kawasan-kawasan yang memiliki karakter yang khas antara lain kawasan Sumbu Filosofi, Mangkubumi, Malioboro, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Kotabaru, Jetis, dan Baciro yang menjadi ciri khas atau wajah Kota Yogyakarta yang akibat pesatnya pembangunan fisik dan akulturasi budaya telah mengalami penurunan karakter sehingga perlu adanya upaya pelestarian karakter kawasan tersebut.

b. Urusan Pertanahan

Permasalahan pertanahan dari waktu ke waktu semakin kompleks dan rumit, terlebih bagi Kota Yogyakarta yang berstatus sebagai kota besar. Beberapa permasalahan urusan pertanahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya warga yang menempati tanah yang belum jelas status kepemilikannya. Hal di atas terutama banyak ditemukan di daerah sempadan sungai dan kantong-kantong permukiman kumuh yang tersebar di beberapa Kelurahan. Tidak adanya alas hak yang dimiliki oleh warga mengakibatkan warga terkadang tidak bisa mendapatkan akses bantuan dari Pemerintah misalnya Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Padahal warga telah menghuni rumah tersebut selama bertahun-tahun atau bahkan ada yang telah turun temurun selama puluhan tahun dengan kondisi rumah yang belum memenuhi standar sehat dan bebas kumuh. Terhadap permasalahan ini maka dibutuhkan sinergitas antar Perangkat Daerah terutama untuk mengurai permasalahan kekumuhan tersebut. Sumbangsih yang

- dapat dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi dalam menuju tertib administrasi pertanahan.
2. Banyaknya ruas jalan di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki alas hak.
Beberapa kasus pertanahan di Kota Yogyakarta berawal dari batas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dengan persil warga yang yang tidak jelas. Ketidakjelasan ini berawal dari tidak adanya alas hak /sertifikat ruas jalan sehingga batas/pathok antara ruas jalan dengan tanah persil didekatnya menjadi tidak diketahui. Kasus yang kemudian sering muncul adalah bangunan warga menjorok atau memakai damija, warga masyarakat sering memakai bahu jalan untuk parkir permanen, dan tidak sedikit yang melakukan penutupan jalan. Terhadap kecenderungan ini sudah barang tentu Pemkot Yogyakarta harus menyikapi agar kedepan tidak semakin serius dan mengganggu situasi sosial di tengah masyarakat Kota Yogyakarta. Kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum dengan melakukan pensertifikatan jalan adalah salah satu solusinya.
 3. Tuntutan dan Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Sebagai salah satu kota besar di Pulau Jawa, Kota Yogyakarta dari waktu kewaktu semakin menarik untuk ditinggali. Hal ini tidak mengherankan mengingat posisi Kota Yogyakarta yang berada di tengah sehingga mudah untuk mengakses ke kota-kota besar lainnya misalnya seperti Jakarta dan Surabaya. Dengan semakin padatnya penduduk di Kota Yogyakarta ini maka tuntutan dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan layanan dasar dari Pemerintah Kota Yogyakarta pun juga semakin besar dan variatif. Untuk menjawab permasalahan ini maka tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghadirkan layanan yang representatif baik itu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial dan layanan lainnya. Untuk dapat menghadirkan layanan yang representatif tersebut maka kebutuhan lokasi/lahan yang layak untuk perkantoran menjadi mendesak untuk dilakukan. Selain itu untuk menghadirkan kota yang nyaman huni maka dibutuhkan hadirnya beberapa fasilitas umum di tengah masyarakat misalnya: hadirnya Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan bangunan penunjang interaksi warga.
 4. Belum tertibnya warga dalam memanfaatkan tanah Kasultanan/Kadipaten
Sebagai sebuah Daerah Istimewa di Indonesia maka Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, salah satu ciri tersebut adalah urusan pertanahan. Kota Yogyakarta sebagai salah satu bagian dari Daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan historisnya maka banyak tanah Kasultanan dan Kadipaten yang tersebar di semua kelurahan di Kota Yogyakarta. Hal ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang salah satunya mengatur bahwa

kasultanan dan kadipaten adalah sebagai subyek hukum yang menguasai tanah milik kraton/kadipaten secara resmi dan sah yang diwujudkan dalam sertifikat hak milik. Namun demikian kondisi di lapangan tanah-tanah milik Kasultanan dan Kadipaten tersebut sudah banyak ditempati oleh warga masyarakat untuk hunian dan permukiman sejak puluhan tahun yang lalu namun tanpa memiliki alas hak apapun. Warga masyarakat sendiri terkadang tidak tahu tindakan yang harus dilakukan untuk mengurai permasalahan tanah yang ditempatinya tersebut.

Dari permasalahan di atas, disimpulkan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, diantaranya:

a. Urusan Penataan Ruang

1. Penyusunan dan pengesahan RTBL sebagai aturan yang lebih mendetailkan RDTR dan PZ pada kawasan-kawasan prioritas.
2. Peningkatan fungsi dan pelayanan terkait tata ruang dalam platform *online*.
3. Perlu adanya kelembagaan yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan tata ruang.
4. Pemenuhan target RTHP melalui upaya penambahan RTHP secara berkelanjutan maupun mempertahankan RTH privat minimal 10%
5. Peningkatan kualitas ruang publik perkotaan
6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyediaan dan penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang berupa insentif dan disinsentif maupun komprehensi pengendalian antara pemangku kepentingan atau Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
7. Peningkatan penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk mendukung tata ruang Keistimewaan.

b. Urusan Pertanahan

1. Pensertifikatan aset non jalan
Langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan ini adalah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum bersertifikat untuk selanjutnya didaftarkan alas haknya ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Selain itu terhadap fasilitas umum seperti balai kampung, balai RW, gedung serbaguna, RTHP dan fasilitas umum sejenis lainnya akan dilakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan secara simultan. Dari hasil pendataan ini bagi yang memenuhi syarat akan dilakukan pendaftaran alas haknya.
2. Pensertifikatan jalan

Sesuai Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 71 tahun 2018 tentang penetapan ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta terdapat 490 ruas jalan yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari 490 ruas jalan tersebut hampir sebagian besar belum bersertifikat dan belum beralas hak. Untuk menjamin kepastian hukum baik dalam pemanfaatan maupun memperkecil potensi sengketa maka Pemerintah Kota Yogyakarta akan melaksanakan pensertifikatan ruas-ruas jalan tersebut secara bertahap yang sudah dimulai sejak tahun 2021. Hal ini penting dilakukan untuk memberi kepastian hukum bahwa dana APBD yang digunakan untuk pemeliharaan jalan benar-benar untuk aset Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara berkelanjutan.

Salah satu wujud perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengalokasian anggaran adalah belanja untuk pembelian tanah bagi kepentingan umum. Fasilitas umum yang akan dibiayai untuk pengadaan tanahnya adalah kantor pelayanan publik untuk kelurahan, kemandren, sekolah, puskesmas dan sejenisnya. Selain itu alokasi belanja tanah untuk kepentingan umum juga akan dialokasikan rutin untuk pengadaan RTHP. Hal ini sekaligus untuk memberikan kepastian bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta serius dalam mewujudkan target luasan RTHP sebesar 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Penyelesaian kasus sengketa tanah terkait tanah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum

Jumlah kasus tanah terkait dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi ruang Kota Yogyakarta yang intensitasnya semakin tinggi sementara kebutuhan ruang publiknya juga semakin meningkat. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dari jumlah kasus yang terdaftar sudah difasilitasi penanganan permasalahan/sengketanya mencapai 100% namun belum semua kasus sengketa tanah tersebut dapat selesai. Hal tersebut disebabkan oleh pihak-pihak yang bermasalah atau bersengketa sulit untuk bersepakat sehingga sampai saat ini masalah tersebut masih berproses.

5. Penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten

Pemerintah Kota Yogyakarta selalu mengambil peran aktif dalam penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Wujud peran aktif tersebut adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan dan fasilitasi pemanfaatan oleh masyarakat terhadap tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Harapan ke depan dengan proses penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini akan membantu dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta turut andil dalam memfasilitasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dimanfaatkan masyarakat. Dengan demikian

tujuan akhir tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Melalui program dan kegiatan yang dimuat dalam Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan dapat memperbaiki permasalahan dan kondisi yang ada.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	6.241.892.496	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	6.241.892.496	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	30 Dokumen	30.132.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	30 Dokumen	30.132.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	31 Laporan	5.072.687.040	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	31 Laporan	5.072.687.040	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17 Laporan	11.301.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17 Laporan	11.301.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 Dokumen	1.566.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 Dokumen	1.566.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	100 Laporan	217.432.310	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	100 Laporan	217.432.310	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	90 Unit	340.209.690	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	90 Unit	340.209.690	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	29 Laporan	180.139.756	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	29 Laporan	180.139.756	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	51 Unit	388.424.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	51 Unit	388.424.700	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	88,67%	2.184.225.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	88,67%	2.184.225.200	
			Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	76,00%				Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	76,00%		

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai	2 Dokumen	452.164.120	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai	2 Dokumen	452.164.120	
			Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai	750 Dokumen				Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai	750 Dokumen		
2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai	2 Dokumen	946.240.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai	2 Dokumen	946.240.000	
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai	1 Dokumen				Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai	1 Dokumen		
2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen	487.883.040	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen	487.883.040	
			Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang selesai	1 Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang selesai	1 Dokumen		
2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai	6 Dokumen	297.938.040	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai	6 Dokumen	297.938.040	
3	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	100%	180.257.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	100%	180.257.000	
3.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai	3 Dokumen	180.257.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai	3 Dokumen	180.257.000	
4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	98,27%	1.589.900.164	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	98,27%	1.589.900.164	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen	1.589.900.164	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen	1.589.900.164	
5	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Persentase Pendaftaran Pemsertifikatan Tanah Aset Pemkot	91,67%	699.089.820	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Persentase Pendaftaran Pemsertifikatan Tanah Aset Pemkot	91,67%	699.089.820	
5.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	6 Laporan	699.089.820	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	6 Laporan	699.089.820	
6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.	50%	78.613.040	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.	50%	78.613.040	
6.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	2 Laporan	78.613.040	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	2 Laporan	78.613.040	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25%	1.394.253.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25%	1.394.253.000	
			Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25%				Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25%		
7.1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai	4 Dokumen	1.003.831.000	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai	4 Dokumen	1.003.831.000	
			Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Dokumen				Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Dokumen		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Berita Acara	390.422.000	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Berita Acara	390.422.000	
			Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen				Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen		
TOTAL ANGGARAN					12.368.330.720	TOTAL ANGGARAN					12.368.330.720

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta menerima banyak usulan/aspirasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan diantaranya terkait usulan pengadaan tanah untuk RTH, fasum ataupun untuk kepentingan umum lainnya serta usulan pensertifikatan/pelacakan alas hak atas tanah yang diduga aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan permohonan hak pakai.

Namun demikian, usulan pengadaan tanah belum dapat diakomodasi dalam perencanaan tahun 2023 karena Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah memiliki daftar tunggu pengadaan tanah dari usulan tahun-tahun sebelumnya yang harus dipenuhi terlebih dahulu pengadaan tanahnya dengan mempertimbangkan skala prioritas, urgensi, dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun 2023. Usulan dari masyarakat ataupun pemangku kepentingan lainnya yang disertai dengan proposal pengadaan tanah serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kamus Usulan Musrenbang akan dicatatkan dalam daftar usulan pengadaan tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Sedangkan untuk usulan pensertifikatan/pelacakan alas hak dan permohonan hak pakai atas tanah yang diduga aset Pemerintah Kota Yogyakarta akan difasilitasi melalui Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kota Yogyakarta

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Tanah Kosong				
1.1	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kel. Terban	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	1 bidang	Pensertifikatan
		Kel. Baciro		1 bidang	Pengurusan hak pakai

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2023 Rencana Kerja Pembangunan Nasional mengusung tema ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan dalam RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tema ***“Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan”*** dengan Prioritas Pembangunan meliputi:

1. Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah;
2. Penurunan Kemiskinan;
3. Pemulihan Ekonomi;
4. Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik; dan
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengarahkan koridor pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 melalui tema ***“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”*** dengan Prioritas Pembangunan terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan;
3. Peningkatan Perekonomian; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yang merupakan Sasaran Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada dokumen perencanaan pusat-daerah yang ada dan diselaraskan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu **“Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”** dan **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**, mendukung prioritas pembangunan Kota Yogyakarta berupa **“Peningkatan Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan”** dan **“Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi”** serta mendukung sasaran Kota Yogyakarta yaitu **“Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang”** dan **“Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan”**.

Tabel 3.1

Prioritas Nasional, Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kota Yogyakarta	Sasaran Kota Yogyakarta
1.	PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	P2. Peningkatan Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	S5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
2.	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	P4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	S8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 dalam rangka mewujudkan sasaran Kota Yogyakarta yaitu Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah:

1. **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang**
Indikator sasaran: Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang
2. **Meningkatnya tertib administrasi pertanahan**
Indikator sasaran: indeks tertib administrasi pertanahan
3. **Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**
Indikator: hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Adapun target dari tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang juga merupakan target tahun pertama Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	81,97

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diupayakan melalui pelaksanaan serangkaian program dan kegiatan. Pada tahun 2023 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta merencanakan 7 (tujuh) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

-
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, , terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu:

-
- a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Rinci (RTRR) Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, , terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - 2) Sistem Informasi Penataan Ruang
 - d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
 - 3) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Pengelolaan Tanah Kosong, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - 1) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

6. Program Penatagunaan Tanah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
 - 1) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
 - 2) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
 - 1) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
 - 2) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.363.330.720,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2023 yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Rencana kerja memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. Penetapan indikator kinerja dan target mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026.

Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										8,426,117,696		7,877,243,926			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,241,892,496		6,205,744,806			
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										30,132,000		28,338,000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Dokumen	100 %	4,776,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	4,776,000
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,994,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,474,000
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2,094,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,574,000
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,574,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,574,000
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,574,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,574,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	21 Laporan	100 %	14,804,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	13,934,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	3,316,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,432,000
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,072,687,040					5,072,687,040
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	35 Orang/bulan	100 %	5,024,501,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	5,024,501,000
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,400,000
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	3,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,400,000
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	3,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,400,000
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,274,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,274,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,566,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	34,653,040			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	34,653,040
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	493,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	493,000
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								11,301,000					11,301,000
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,794,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,794,000
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,566,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,566,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	2,431,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,431,000
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	2,805,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,805,000
1.03.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,139,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,139,000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1,566,000					1,566,000
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,566,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								217,432,310					209,531,310
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	6,080,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	5,300,000
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	6,110,310			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	6,110,310

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Paket	100 %	27,500,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	26,350,000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	4,500,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,640,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	90 Laporan	100 %	170,110,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	166,579,000
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3,132,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,552,000
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								340,209,690			329,140,000	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	48 Unit	100 %	223,753,840		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	216,000,000
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	50 Unit	100 %	116,455,850		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	113,140,000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180,139,756			180,146,256	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Laporan	100 %	7,105,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	7,111,500
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	4,200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	4,200,000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	168,834,756			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	168,834,756
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								388,424,700					373,035,200
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	26,700,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	23,500,000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	14 Unit	100 %	116,425,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	99,525,000
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	16 Unit	100 %	4,475,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	5,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	24 Unit	100 %	40,824,700			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	44,510,200
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	200,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	200,000,000
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								2,184,225,200					1,671,499,120
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								452,164,120					431,038,040
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	2 Dokumen	100 %	228,206,080			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	236,580,000
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	750 Dokumen	100 %	223,958,040			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	194,458,040
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								946,240,000					463,120,000
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	4 Dokumen	100 %	741,960,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	260,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	2 Dokumen	100 %	204,280,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	203,120,000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								487,883,040					487,883,040
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	1 Dokumen	100 %	336,303,040			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	336,303,040
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	1 Dokumen	100 %	151,580,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	151,580,000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								297,938,040					289,458,040
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	2 Dokumen	100 %	38,580,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	38,580,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	3 Dokumen	100 %	195,660,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	187,180,000
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	1 Dokumen	100 %	63,698,040			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	63,698,040
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							3,942,213,024					7,341,844,920
2 10 04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							180,257,000					180,302,000
2 10 04 2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							180,257,000					180,302,000
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kejelasan status hukum pertanahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	3 Dokumen	100 %	180,257,000			Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	100 %	180,302,000
2 10 05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							1,589,900,164					5,000,000,000
2 10 05 2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,589,900,164					5,000,000,000
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya aset/ fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,27 %	1 Dokumen	100 %	1,589,900,164			Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	98,27 %	5,000,000,000
2 10 08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG							699,089,820					699,089,920
2 10 08 2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							699,089,820					699,089,920
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	91,67 %	6 Laporan	100 %	699,089,820			Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	91,67 %	699,089,920
2 10 10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							78,613,040					68,200,000
2 10 10 2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							78,613,040					68,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	50,00 %	2 Laporan	100 %	78,613,040			Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	50,00 %	68,200,000
2 10 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN							1,394,353,000						1,394,253,000
2 10 11 5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten							1,003,831,000						1,003,831,000
2 10 11 5.01 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Terwujudnya kejelasan batas wilayah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	4 Dokumen	100 %	898,081,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25,00 % 25,00 %	898,081,000
2 10 11 5.01 04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Terwujudnya kejelasan batas wilayah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	2 Dokumen	100 %	105,750,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25,00 % 25,00 %	105,750,000
2 10 11 5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten							390,522,000					390,422,000	
2 10 11 5.02 01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Kejelasan status hukum pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	1 Dokumen	100 %	315,661,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25,00 % 25,00 %	315,661,000
2 10 11 5.02 02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Kejelasan status hukum pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	2 Berita Acara	100 %	74,861,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25,00 % 25,00 %	74,761,000
TOTAL									12,368,330,720				15,219,088,846	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja beserta pagu anggaran yang termuat dalam Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 masih bersifat indikatif yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 selanjutnya akan dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan dokumen Renja dapat dijadikan pedoman dan sekaligus tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di tahun 2023.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP
NIP. 19720411 199803 1 007